<DOWN-LOAD-PRINT-COPY-AND-PASTE>

2025

<Download-Print-Copy-and-Paste> adalah seruan untuk melanjutkan tradisi itu: merebut kembali makna penciptaan dari tangan konglomerat kebudayaan yang hari ini mengurungnya dalam pagar kepemilikan.

Sebuah Pengantar

“Pikirkan mengenai hal-hal menakjubkan yang dapat dilakukan atau dibuat oleh anak Anda dengan teknologi digital—film, musik,halaman Web, blog. Atau pikirkan mengenai hal-hal menakjubkan yang bisa difasilitasi komunitas Anda dengan teknologi digital— wikipedia, pengumpulan dana, aktivisme untuk mengubah sesuatu.”

—Lawrence Lessig

...

Apa yang lebih indah selain bisa membuat, mengadaptasi, membagikan, melipatgandakan, mendistribusikan, sekaligus melihat, mengalami proses-hasil dari sebuah karya yang akhirnya dapat berfungsi sebagaimana ia seharusnya, sebagai produk budaya bebas?

Bicara budaya bebas, seharusnya bukanlah sesuatu yang menakutkan ataupun utopis. Ia adalah kesadaran bahwa sebuah karya yang sudah ada bisa dibarukan, dibagikan, dimodifikasi, direinterpretasi dan bergerak dengan sendirinya, tanpa terjebak aturan lisensi yang membelenggu. Lawrence Lessig dalam *Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity (2004)* menunjukkan bahwa ketika rezim hak cipta diperpanjang dan ruang publik *(public domain)* dipersempit, kreativitas justru semakin tersendat. Ini tentu bisa menjadi perdebatan panjang.

Kiwari, masalahnya, urusan kebebasan semakin pelik. Di era sekarang, kita menyadari bahwa dengan telah adanya akses atau lisensi terbuka, ternyata itu tidak cukup untuk memastikan “budaya bebas” benar-benar bebas. Sebuah karya, poster misalnya, tetap bisa diunduh, disebarkan, tapi jika kekuasaan dan turunannya semakin mempunyai kontrol, kebebasan itu tetap terbatas. Nantinya, poster tersebut hanya akan jadi kertas yang menguning di rak buku atau file-file yang mangkrak di folder komputer.

Dengan kata lain: budaya bebas akan menjadi nyata ketika beberapa hal ini terpenuhi; (1) akses; (2) infrastruktur; (3) jaringan kolektif; (4) kesadaran. Syahdan, simpul-simpul kolektif otomatis menguat. Batasan-batasan dengan sendirinya melemah. Persebaran makin cepat meluas.

Di sini, poster, sebagai produk budaya bebas menjadi salah satu upaya konkret untuk mewujudkan hal itu: aksesibel, inklusif, bersifat kolektif, *copyleft*, pun dalam bentuk digital, filenya bisa diunduh, dicetak, ditempel oleh siapa pun di mana pun, tak peduli siapa penciptanya. Yang penting pesan apa yang muncul dan bagaimana audiens memaknainya.

Poin ini juga ditekankan oleh Elizabeth “Dori” Turnstall, antropolog desain, dalam artikelnya *“Design’s Role in Activism Can Go Deeper Than Posters and T-Shirts (2018)”*, yang terbit di *AIGA Eye on Design,* bahwa

poster dan *banner* bukan hanya alat komunikasi, tetapi sarana untuk merumuskan nilai dan kolektivitas.

Untuk menjelaskan contoh-contoh konkretnya, sebagai *disclaimer*, saya harus mengutip dari beberapa sumber. Salah satunya kolektif seperti *Beehive Design Collective* di Amerika yang memproduksi poster dalam jumlah besar dengan lisensi bebas/non-komersial untuk gerakan global, ini menunjukkan praktik nyata distribusi bebas yang berpijak pada nilai kolektivisme.

Contoh lain yang tak kalah menarik, studi yang dilakukan Quincy B. Feliscuzo dalam *Audience as Co-Designer: Participatory Designed Posters for Flood Awareness and Preparedness, Vol. 3, Article No. 20 (2025),* yang terbit di *Springer* pada bulan September kemarin, menunjukkan bahwa dalam pembuatan poster, konteksnya tanggap bencana, dalam hal ini kesiapsiagaan banjir, di mana audiens dilibatkan sebagai sesama pencipta dan pengambil keputusan secara setara, partisipatoris.

Metode ini berguna untuk memperluas jangkauan pendistribusiannya secara kolektif, dan bisa beresonansi secara budaya. Sehingga pesan dari poster tersebut bisa menjadi terus relevan. Dengan begitu ia berfungsi sebagaimana seharusnya. Sebagai alarm penyadaran dan terbebas dari kepemilikan tunggal penciptanya.

Selain contoh-contoh tersebut, budaya bebas juga hadir di ranah digital: praktik *peer-to-peer (P2P)* melalui situs seperti *The Pirate Bay* yang digagas Gottfrid Svartholm atau pengarsipan poster digital semacam *"The Palestine Poster Project Archives (PPPA)"* yang berawal dari tesis Dan Walsh, menunjukkan bagaimana distribusi alternatif berkembang di luar regulasi tradisional hak cipta. Senapas dengan kajian yang dilakukan Jääsaari & Hildén dalam *"Piracy & Social Change: From File Sharing to Free Culture (2023)"*, yang menunjukkan bagaimana gerakan *P2P* dan partisipasi digital memperluas gagasan kebebasan budaya dalam jaringan global.

Secara lebih luas, praktik ini juga dilakukan *Justseeds Artists Cooperative* yang menyediakan poster grafis beresolusi tinggi, dapat diunduh secara bebas. *Justseeds,* sebagai kolektif para seniman yang sudah terdesentralisasi secara geografis (AS, Kanada, Meksiko) dan secara organisasional sudah rapi, berfungsi sebagai jaringan yang memungkinkan karya-karya poster bisa tersebar luas, hingga skala internasional.

Namun yang perlu digarisbawahi, mereka juga mencatat bahwa banyak seniman masih memerlukan dana, akses cetak, dan jaringan distribusi lokal agar karyanya benar-benar bisa tersebarluaskan.

Berpijak pada praktik yang telah banyak dilakukan di atas, kolektivitas dan desentralisasi menjadi relevan untuk dibahas. Sistem desentralisasi seperti *blockchain* dan *platform web3* mulai dipertimbangkan: karya seni *digital* dan ekosistem kolektor seni mulai dieksplorasi sebagai jaringan terbuka, bukan hanya milik galeri besar. Ia mampu membebaskan karya dan pendistribusiannya dari monopoli sistem yang sentralistik.

Ihwal juga diperkuat paparan Massimo Franceschet, dkk. dalam artikelnya *"Crypto Art: A Decentralized View (2019)"* dan juga dalam artikel *"Blockchain Technologies and the Future of Art (2023)"* yang ditulis Bajac & Lakatoš, bahwa seni digital dapat dikelola secara desentralisasi, transparan, dan tentu saja inklusif.

Desentralisasi memungkinkan pemerataan ekonomi kolektif dan distribusi global bisa berjalan tanpa bergantung pada institusi elit dan lisensi-lisensi yang memberatkan. Meski bukan sebagai solusi instan, sistem ini tetap memliki tantangan keberlanjutan. Inilah yang menjadi tugas kita bersama.

Melalui *Zine* ini, dalam rangka merayakan "lebaran cetak", dan untuk membumikan semangat kebebasan kreatif, langkah praksis yang memungkinkan untuk dilakukan adalah terus memproduksi karya, khususnya poster, menggandakannya, menyediakan file-file digitalnya dengan lisensi bebas agar bisa dicetak siapa saja. Membangun jaringan kolektif lokal yang memungkinkan untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, membuat ruang-ruang baru; memfasilitasi *workshop* terkait itu. Dan yang tak kalah penting, memanfaatkan logika desentralisasi untuk pemerataan ekonomi kolektif dan saling memberdayakan, sekaligus membebaskan karya itu sendiri. Seperti semangat *copyleft* yang telah ada puluhan tahun silam dan telah dipraktikkan oleh *Pirate Bay, Justseeds, PPPA* dan kita, yang sekarang sedang membaca tulisan ini.

Lenteng Agung, 4 November 2025

Illustruth



The Pirate Bay & Masa Depan Tanpa Hak Cipta

Oleh: Muhammad Nauval Firdaus

Tulisan ini dirilis di bawah lisensi CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication.

Pada suatu malam yang biasa-biasa saja, di studio saya, laptop menyala dan layar kembali menyuguhkan dunia maya. Kali itu, saya sedang mencari sesuatu yang menantang untuk dikoleksi, sebuah karya seni digital yang mungkin bisa saya bawa ke generasi berikutnya, untuk anak-anak saya—atau setidaknya dijual dengan harga tinggi di tahun-tahun depan. Alhasil, sebuah lukisan karya seorang seniman digital mengusik mata saya: kapten bajak laut tikus tengah mengarungi badai di atas kapal kayunya. *Bajak laut, tikus, badai*—tiga elemen yang membentuk *realm* yang saya resapi. Mengingatkan saya pada kata-kata anakata, alias Per Gottfrid Svartholm Warg—pionir di balik *The Pirate Bay*—pernah menulis di Twitter:

"Information wants to be free."

Saya tidak sekedar mengunduh lukisan itu dan memajangnya sebagai *wallpaper* di layar—seperti yang setiap hari saya kerjakan di masa sekolah menengah dulu. Saya membeli karya itu di platform NFT berbasis Tezos, dengan harapan bisa lebih banyak menaruh diri di pasar seni *virtual web3*, yang bagi saya, adalah tempat di mana pengetahuan, ide, dan karya bisa hidup bebas, lolos dari belenggu monopoli pengetahuan.

Lalu, di balik aktivitas digital dan transaksi *blockchain* ini, saya tahu bahwa saya terhubung dengan sebuah pertanyaan yang lebih besar: *Apa yang seharusnya dimiliki oleh hak cipta?* Apakah karya seni harus terkungkung dalam batas-batas hukum yang sempit, atau akankah kebebasan dalam berbagi dan mencipta menuntun kita menuju era baru pengetahuan dan ekspresi?

Pembajakan & Pembebasan

The Pirate Bay, situs berbagi file legendaris yang dibentuk oleh kelompok anti-hak cipta *Piratbyrån* di Swedia pada tahun 2003, bukan sekadar situs untuk menonton film atau mengunduh *software*. Ini dianggap sebagai benteng kebebasan informasi, sebuah penghormatan terhadap semangat Prometheus—untuk memberi *api* pengetahuan kepada masyarakat tanpa batas. "Tapi bukankah itu ilegal?", tanya sebagian orang yang melihatnya dari sudut pandang yang lebih konservatif. Di sinilah letak paradoksnya: *The Pirate Bay* bukanlah sekadar pembajak; ia adalah perlawanan terhadap sistem yang menganggap hak cipta sebagai penjaga gerbang yang menghalangi kebebasan berekspresi dan distribusi informasi.

Di dunia ini, di mana kekuatan besar memegang monopoli pengetahuan, *The Pirate Bay* menantang narasi tersebut. Seperti yang dikatakan Banksy,

"Copyright is for losers!"

Mengapa harus membatasi pengetahuan dan seni hanya karena ia dibungkus dalam label komersial? Dengan teknologi *BitTorrent* yang digunakan oleh *The Pirate Bay*, file-file tidak lagi terpusat di satu server, melainkan tersebar di seluruh dunia, tidak terikat oleh batasan negara atau hukum tertentu. Begitulah cara para pembajak ini mencuri *api*, mengobarkan pembebasan dari dunia yang penuh regulasi dan kontrol ketat.

Anakata, alias Per Gottfrid Svartholm Warg, adalah tokoh yang tak bisa dipisahkan dari kisah *The Pirate Bay*. Terlahir sebagai seorang pemuda yang melihat dunia teknologi dengan cara yang berbeda, Warg bukan sekadar seorang pengembang perangkat lunak, tetapi juga seorang *nomad digital,* salah satu dari sedikit orang yang memahami bagaimana dunia terhubung melalui jaringan dan informasi. Mungkin Warg adalah seorang Prometheus versi modern, yang mencuri informasi dari kekuatan besar dan memberikannya kepada dunia—tanpa bayar, tanpa izin.

Namun, perjalanan Warg tidak berjalan mulus. Pada tahun 2012, ia ditangkap oleh pihak berwenang di Kamboja dan menghadapi dakwaan terkait pelanggaran hak cipta. Pada saat yang sama, ia juga berbicara tentang kebebasan berbagi informasi di berbagai platform, dengan tegas

mengatakan, *informasi menginginkan kebebasan*. Ia mengungkapkan bahwa di dunia yang semakin terhubung ini, konsep pemilikan atas informasi tidak lagi relevan. Apa yang menjadi milik siapa jika jaringan digital merambat tanpa henti, menghubungkan segala sesuatu yang sebelumnya terisolasi?

Free Culture & So Forth

Kita kini berada di dunia yang didominasi oleh jaringan. Informasi bergerak lebih cepat dari apapun yang pernah ada sebelumnya, dan tidak ada lagi batasan yang bisa menghentikan alirannya. Begitulah kira-kira, Manuel Castells, dalam *The Rise of the Network Society*. Castells melihat bahwa jaringan ini lebih sering mengarah pada pemberdayaan individu, tetapi juga menciptakan ketegangan dengan sistem yang ada.

Dalam *Le Capitalisme Cognitif: La Nouvelle Grande Transformation,* Yann Moulier-Boutang mengungkapkan bahwa kapitalisme kini bergantung pada pengolahan pengetahuan dan informasi, bukan lagi pada barang fisik. Ini menjadi alasan mengapa hak cipta menjadi alat yang sangat kuat—karena siapa yang mengendalikan informasi, mengendalikan dunia. Namun, untuk memecah rantai ini, kita harus kembali kepada akar kebebasan itu sendiri.

Di dunia yang semakin mengarah pada kapitalisme kognitif ini, kita juga harus mengingat pandangan James Boyle dalam *The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind,* di mana dia menekankan betapa berbahayanya jika kita terus membiarkan "komunalitas pengetahuan" menjadi milik segelintir orang. Ketika pengetahuan dan budaya dikurung dalam sistem hak cipta yang ketat, kita kehilangan potensi besar untuk berinovasi dan berkembang.

Seperti yang dipaparkan Lawrence Lessig dalam *Free Culture*—yang mengajak kita untuk berpikir kembali tentang hak cipta, Lessig berpendapat bahwa hak cipta seharusnya tidak menjadi alat untuk merampas kebebasan kreatif, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dan masyarakat luas.

Tentu saja, ada yang mengatakan bahwa ini semua hanya bentuk "perlawanan kecil" yang tak akan mengubah banyak hal. James C. Scott dalam *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* menyebut perlawanan seperti ini sebagai "perlawanan sehari-hari." Memang, meski The Pirate Bay sering kali dianggap sebagai situs ilegal, tetapi mereka berhasil menciptakan perlawanan yang berulang dan tersembunyi dalam bentuk berbagi informasi secara massal. Dan yang lebih penting, ia membawa kita ke perdebatan lebih besar tentang apa yang benar-benar dapat dianggap sebagai "hak cipta."

Malam itu, saya kembali menatap layar dengan tenang. Menikmati beberapa koleksi baru saya. Lukisan itu, si bajak laut tikus, bukan hanya karya seni digital. Ia adalah lambang perlawanan terhadap sistem yang berusaha mengunci pengetahuan dalam peti mati hukum. Saya tidak hanya mengkoleksi lukisan ini—saya mengkoleksi ide, sejarah, dan pergolakan.

Apakah kita akan terus terbelenggu oleh pembatasan hak cipta, atau akankah kita seperti Prometheus, yang berani mencuri api dari para dewa dan memberikan pengetahuan itu kepada dunia? Apakah di internet, kaum papa akan selamanya kita jerat dengan hak cipta?

Sumber:

[1] Castells, M. (1996). *The Rise of the Network Society.* Blackwell Publishers.
[2] Boyle, J. (2008). *The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind.* Yale University Press.

[3] Lessig, L. (2004). *Free Culture: The Nature and Future of Creativity. Penguin Press.*

[4] Moulier-Boutang, Y. (2011). *Le Capitalisme Cognitif: La Nouvelle Grande Transformation.* Éditions Amsterdam.

[5] Scott, J. C. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance.* Yale University Press.

ART AS RESIST (A)NCE

Langit Baru Seni: Dunia Baru Bagi Para Kreator

Oleh: Kevin Alfirdaus Arief

“Kemajuan digitalisasi tidak membuat para seniman makin lemah atau kecolongan, tetapi bisa jadi, seperti kata Joost Smiers dan Marieke van Schijndel; dengan membayangkan dunia tanpa hak cipta - seniman dapat menghentikan toleransi terhadap segelintir konglomerat budaya yang mengendalikan komunikasi budaya kita.
Selain itu, kita diminta untuk tidak hanya membebaskan diri dari rantai distribusi tradisional, tetapi berdikari atas karya-karya kita sendiri di platform yang punya visi kebebasan pengetahuan atas seni. Kita diajak untuk melepaskan anggapan bahwa hak cipta dapat memberikan penghidupan yang lebih baik bagi sebagian besar”

Di tengah derasnya arus digital seperti (Seniman vs AI/Seni tradisional vs Seni Digital). Dari situlah semangat baru lahir karena mereka sedang merebut kembali makna penciptaan. Dunia seni lama dibangun di atas pagar hak cipta, izin distribusi, dan hierarki institusional. Meski kini era telah melampaui itu, kini, hal yang paling menarik ialah mengakui bahwa mereka juga menulis ulang peta kekuasaan budaya itu sendiri. Inilah babak baru di mana kebebasan berkarya punya jalannya sendiri.

Nyatanya, kemajuan digitalisasi tidak membuat para seniman makin lemah atau kecolongan, tetapi bisa jadi, seperti kata Joost Smiers dan Marieke van Schijndel; *“dengan membayangkan dunia tanpa hak cipta, seniman dapat menghentikan toleransi terhadap segelintir konglomerat budaya yang mengendalikan komunikasi budaya kita.”*

Kita diajak untuk melepaskan anggapan bahwa hak cipta dapat memberikan penghidupan yang lebih baik bagi sebagian besar seniman.

Sebetulnya, bukan hak cipta. Melainkan hak prerogatif pengkaryaan.

Di tangan segelintir konglomerat budaya, hak seniman berubah fungsi: dari pelindung kreasi menjadi alat monopoli, barikade yang menahan arus kreativitas agar hanya segelintir pihak yang berkuasa mendapatkan keuntungan—sementara mayoritas pembuat tetap terpinggirkan.

Saya beri perbandingan. Selama berabad-abad, dunia seni rupa berada di bawah kendali galeri elit, rumah lelang, dan kurator besar seperti Sotheby’s (1744) dan Christie’s (1766). Nilai karya ditentukan oleh jejaring sosial, reputasi galeri, dan eksklusivitas kolektor. Seniman muda harus melewati seleksi ketat—pameran, residensi, dan koneksi sosial—untuk diakui. Bahkan setelah terjual, komisi galeri mencapai 40–50%, membuat kuasa ekonomi tetap di tangan institusi, bukan pencipta. Seni pun berfungsi sebagai simbol status kelas atas, bukan ruang kebebasan artistik.

Pada 11 Maret 2021, Christie’s melelang karya digital “*Everydays: The First 5000 Days”* oleh Beeple (Mike Winkelmann) senilai USD 69,3 juta—karya NFT *(Non-Fungible Token)* pertama yang terjual di rumah lelang besar. Karya ini hanya berbentuk file digital di *blockchain* Ethereum, tanpa galeri, kurator, atau sertifikat fisik. Nilainya ditentukan oleh komunitas digital, dan setiap penjualan ulang memberi royalti otomatis kepada Beeple melalui *smart contract.*

Peristiwa ini mengguncang sistem seni tradisional dan membuka era baru. Dalam hitungan minggu, ratusan seniman digital mulai menjual karya langsung ke kolektor global melalui platform *OpenSea*, *Foundation*, dan *SuperRare*. *Web3* pun melahirkan model distribusi seni yang lebih terbuka, transparan, dan berpihak pada pencipta.

Di sinilah digitalisasi menghadirkan momen kritis: *bukankah lebih masuk akal menggunakan jaringan global untuk memperluas akses, bukan menambatkan karya pada rantai distribusi yang rapuh dan eksklusif?*

Argumentasi bahwa hak cipta akan menyelamatkan hidup seniman adalah romantisme kebijakan lama yang gagal melihat realitas. Hukum yang idealnya melindungi kreator seringkali berbelok menjadi mesin yang memelihara perantara: label, galeri, distributor, dan platform besar yang mengumpulkan nilai signifikan dari karya yang bukan—atau hanya sebagian—mereka ciptakan. Sementara itu, seniman diminta berkompromi: potong royalti demi visibilitas, jual hak, atau tunduk pada klausul yang mematikan kebebasan berkarya. Itu bukan perlindungan; itu perdagangan nasib.

Lalu, apa alternatifnya? Pertama: kemandirian distribusi. Era digital memberi seniman alat untuk memproduksi, mendistribusi, dan mempromosikan karya tanpa perantara yang menguras nilai. Platform yang mengusung prinsip kebebasan pengetahuan dan pembagian—bukan ekstraksi—mengubah hubungan antara pencipta dan publik. Dalam model ini, karya tidak menjadi komoditas tertutup, melainkan modal sosial yang bergerak, memicu dialog dan kesempatan kolaboratif. Bukti praktiknya sederhana: karya yang beredar luas membangun audiens, reputasi, dan aliran ekonomi yang beragam—dari donasi, kerja komisi, hingga penjualan langsung.

Kedua: radikalisasi hak berbagi—bukan penghapusan perlindungan moral bagi pencipta, tetapi penolakan terhadap klaim kepemilikan eksklusif yang mengekang. Lisensi bebas, perjanjian kolektif, commons budaya—semua ini menunjukkan bahwa perlindungan bisa direka ulang untuk menumbuhkan komunitas kreatif yang adil tanpa bergantung pada monopoli. Seniman harus menuntut kebijakan yang menempatkan pembuat di pusat pengambilan keputusan, bukan perusahaan yang mengumpulkan data, perhatian, dan keuntungan.

Ketiga: politik ekonomi budaya. Perdebatan tentang hak cipta tak boleh diserahkan kepada ahli hukum dan CEO. Ini masalah kekuasaan: siapa yang berhak menentukan bagaimana budaya beredar? Seniman harus melebur jadi kolektif, mempengaruhi regulasi, dan menolak normalisasi model bisnis yang mengukuhkan dominasi korporat. Perubahan struktural—subsidi publik untuk kreator, pajak platform yang mengakumulasi keuntungan dari karya publik, dan dukungan infrastruktur untuk inisiatif *commons*—adalah tindakan nyata, bukan retorika.

Kritik ini bukan ajakan naif untuk membiarkan karya "dicuri". Ini seruan strategis: hentikan memberikan legitimasi pada sistem yang menyelewengkan tujuan asli perlindungan kekayaan intelektual—yaitu memfasilitasi kreativitas demi kebaikan bersama.

Kini, dalam bayangan dunia *web3*, kita menyaksikan pasar seni yang tumbuh tanpa pusat. Karya tidak lagi ditentukan nilainya oleh galeri elit atau algoritma korporat, tetapi oleh komunitas yang saling terhubung melalui kontrak cerdas dan jaringan dunia baru di mana siapapun berjuang untuk hidup dengan seni dan juga gagasan politiknya. Di dunia ini, nilai ekonomi melekat langsung pada proses penciptaan, bukan pada hak eksklusif yang membatasi peredaran. Inilah ekonomi kesenian yang benar-benar merdeka: seniman mengatur sendiri cara berbagi, menjual, atau bahkan menghapuskan batas antara seni dan partisipasi publik.

Lebih jauh, beberapa harusnya menyadari bahwa mereka telah melampaui itu, memindahkan pusat kuasa dari negara dan korporasi menuju komunitas dan jaringan. Dan dari situlah tantangan beragam yang harus seniman hadapi selama menjadi arsitek ekosistem budaya yang baru. Ia menciptakan sistem ekonomi paralel—di mana solidaritas telah jadi fondasi.

Kta diminta untuk tidak hanya membebaskan diri dari rantai distribusi tradisional - tetapi berdikari atas karya-karya kita sendiri di platform yang punya visi kebebasan pengetahuan atas seni.

Akhirnya, seni hidup karena ia berinteraksi—berubah makna ketika ia berhasil disebarkan. Menjadi barang berharga ketika ia berhasil dimiliki. Pilihannya jelas: mempertahankan kepemilikan sempit yang memiskinkan kreator, atau merancang ulang aturan main sehingga kreativitas adalah kekuatan kolektif—terbuka, berkelanjutan, dan dibangun oleh mereka yang paling berhak atasnya: para pencipta sendiri.

PANDUAN LAPANGAN WHEATPASTE POSTER

Field Guide to Wheatpaste 101

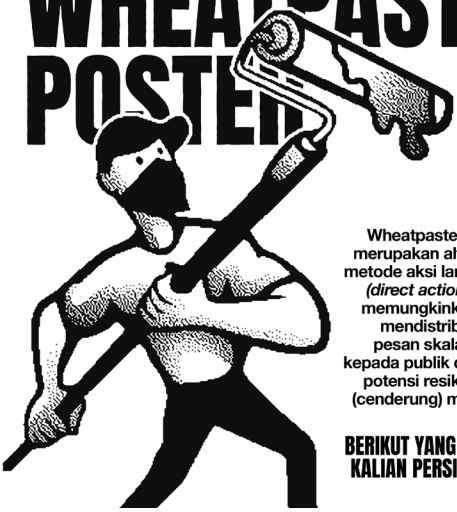

Wheatpaste poster merupakan alternatif metode aksi langsung *(direct action)* yang memungkinkan kita mendistribusikan pesan skala besar kepada publik dengan potensi resiko yang (cenderung) minimal.

BERIKUT YANG PERLU KALIAN PERSIAPKAN

ALAT TEMPEL

Roll Cat



Roll cat dapat membalurkan lem secara efisien dan cepat, dengan tambahan tongkat roll, poster dapat ditempelkan di ketinggian, sehingga butuh usaha yang lebih untuk merobeknya.

Kuas



Kuas cocok membalurkan lem pada tekstur yang tidak merata, semakin lebar ukuran kuasnya, semakin efisien dalam membalurkan lem perekat.

Spons



Dengan ukuran relatif kecil, spons nyaman untuk dibawa. Namun, butuh waktu untuk membalurkan lem secara merata sehingga kurang cocok untuk poster ukuran besar.

PEMBUATAN LEM PEREKAT

Lem Kanji

1. Siapkan tepung dan air pada mangkuk, kocok tepung tapioka dengan air dingin secukupnya untuk membuat bubur yang tidak menggumpal.
2. Panaskan air dalam panci.
3. Tuang campuran tepung dan air dingin ke dalam air mendidih, pastikan api kecil.
4. Aduk campuran secara terus-menerus selama sekitar 10-20 menit, atau sampai mengental seperti pasta, takaran sesuaikan dengan kebutuhan.
5. Angkat dan pindahkan hasil lem pada tempat yang sudah kalian sediakan. Begitu lem dingin, lem siap digunakan.

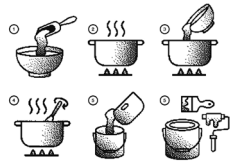

Tips: Tekstur cenderung kental, sehingga butuh wadah berbentuk silinder dan berlubang besar seperti ember cat, tumbler dll.

Lem Kayu

1. Siapkan air hangat atau mendidih: tuangkan pada tempat yang sudah disediakan, botol air mineral, ember atau wadah apapun.
2. Masukan lem kayu kedalam wadah: Lem kayu yang mudah ditemukan misalnya lem fox putih.
3. Campurkan dan aduk atau kocok air hangat dengan lem kayu secara merata. Berbeda dengan lem tapioka, tekstur lebih putih encer dan tidak terasa rekat, namun ketika lem mengering daya rekatnya sangat baik. Takaran sesuaikan dengan kebutuhan.
4. Saat dingin, lem siap digunakan. Pastikan mengocoknya terlebih dahulu sebelum menempelkan lem pada tembok.



Tips: Dengan tekstur yang encer, lem kayu mudah dimasukan kedalam tempat misalnya botol air mineral. Kamu bisa melubangi tutup air mineral dan tinggal menyemprotkannya pada tembok yang dituju, sebelum nantinya diratakan dengan alat tempel.



SIAPKAN POSTER

Pastikan pesan dan visual yang akan disampaikan lewat poster mudah dipahami oleh audiens.

Maksimalkan ruang dengan membuat poster yang sesuai ukuran kertas. Ukuran kertas yang beredar biasanya A4, A3, A2 dst. Hal ini akan membuat kita lebih efisien dalam mencetak dengan hasil yang optimal.

Tips: Kebanyakan orang akan melihat poster dari kejauhan, jadi buatlah judul yang besar dan mudah terbaca, dan gunakan gambar yang sederhana, kontras tinggi, dan sama besarnya. Pastikan judul mengkomunikasikan ide dasarnya dengan sendirinya. Utamakan audiens pembaca.

Poster dapat dicetak dengan jenis teknik cetak apapun: mesin printer rumahan, fotokopi, digital print maupun manual.

Dalam konteks poster wheatpaste penggandaan menjadi yang paling penting. Semakin banyak poster digandakan dan diaplikasikan di berbagai tempat, semakin berpotensi untuk dilihat oleh banyak orang. Jadi, bijaklah memilih percetakan.

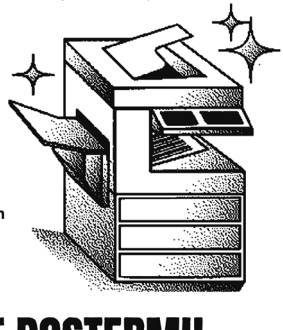

METODE PEMASANGAN

1. Tentukan spot: Tembok dengan tekstur rata akan menghasilkan wheatpaste yang optimal.
2. Balurkan lem pada tembok dengan bantuan roll cat dll, pastikan lem menempel hingga rata.
3. Tempel wheatpastemu, usahakan untuk rapi sehingga tidak ada gambar/informasi yang terlipat.
4. Balurkan lagi lem pada permukaan poster yang sudah ditempel, hal ini melapisi poster agar susah dirobek.

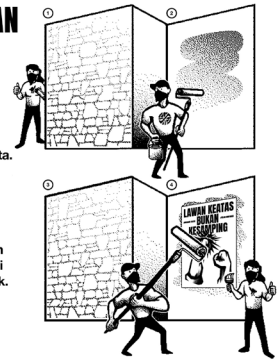

DO'S AND DON'TS!

Do's

1. Pilih spot yang potensial dilihat orang banyak, kita bisa memasangnya pada ketinggian untuk mengantisipasi pengerusakan poster.
2. *Do it Your Friend*, akan lebih baik jika ada tangan lain yang membantu pemasangan wheatpaste, atau berjaga jaga melihat situasi sekitar spotmu. Sebisa mungkin pemasangan wheatpaste dilakukan dengan cepat sehingga tidak ada orang yang menyadari aktivitasmu. Pastikan saling jaga satu sama lain.
3. Tetaplah anonim, kenakan masker atau pelindung wajah lainnya. Sebisa mungkin tidak tertangkap kamera keamanan maupun aparat.

Don'ts

1. Bijaklah memilih spot. Karena tembok dipergunakan oleh banyak sekali orang, tidak disarankan untuk menutupi karya kawan-kawan lainnya, misalnya karya mural, *grafitti piece*, dan karya lainnya.
2. Selebihnya sikat!

MULAI BUAT POSTERMU, ATAU PAKAI KARYA YANG SUDAH KAWAN-KAWAN BUAT

SAATNYA RE-KLAIM RUANG PUBLIK KITA



DISAHKAN TANPA KETERLIBATAN PUBLIK
Kita adalah kekuatan
FASIS
اضربوا الفاشية
WE START
THE ONLY GOOD FASCIST IS A DEAD FASC
SWEET
Scary
THE STREET
A C A B
Have The Hour
AC
AB
KEMBALIKAN TENTARA KE BARAK!!
RANGKUL KAWAN DARI SEMUA LINI
KE BARAK
LAWAN KEATAS BUKAN KESAMPING
#JEGAL RUU POLRI
#GAGALKAN RUUTNI
SENJATA TIDAK BISA DIAJAK DIALOG!
UU TNI NO 34 2025 MENGANCAM SUPREMASI SIPIL
#GAGALKAN RUUTNI
#TOLAK DWIFUNGSI
Let Fury Have The Hour
MELINDUNGI DAN MELAYANI OLIGARKI
#AKHIRI REPRESI POLISI
#JEGAL RUU POLRI
DISAHKAN TANPA KETERLIBATAN PUBLIK
#GAGALKAN RUUTNI
#INDONESIAGELAP
REPRESI BUKANLAH ALAT NEGOSIASI
اج اب
KAMI Sudah MUAK!
ACAB
#GAGALKAN RUUTNI
#TOLAK DWIFUNGSI
BERSAMA TEMPO



Lem, Kertas, dan Teror

Oleh: Yulia Adiningsih

Bayangkan jika kota-kota, desa-desa, kampung-kampung dipenuhi oleh poster kritik dan tuntutan. Di pasar, di meja, di sekolah, di lorong-lorong hingga toilet. Apa yang akan terjadi?

Di sebuah kedai di pusat kota Yogyakarta, seorang teman dari teman yang baru saya temui dua kali mengajak saya membayangkan hal itu terjadi. Dari obrolan ngalor-ngidul, topik tren intimidasi dan kriminalisasi visual yang kian marak membawa kami untuk membayangkan okupasi ruang dengan poster massal.

Tren ini berbeda dengan apa yang terjadi di era Soeharto, saat kriminalisasi lebih banyak menyasar tulisan.

Rezim Orde Baru banyak memenjarakan sastrawan karena tulisannya dianggap berbahaya. Misalnya, Pramoedya Ananta Toer, Putu Oka Sukanta, penyair dari Riau H.R. Bandaharo, dan Wiji Thukul.

Media-media seperti *Tempo*, *Detik*, dan *Editor* juga dibredel karena pemberitaannya dianggap mengganggu stabilitas negara. Sensor sana-sini.

Para seniman rupa dijebloskan ke jeruji besi. Namun, lebih banyak karena terafiliasi dengan organisasi yang juga dianggap berbahaya oleh diktator saat itu. Hendra Gunawan, Misbach Tamrin, Djoko Pekik, Harijadi S. Hartowardojo, Gebar Sasmita hanya beberapa di antaranya.

Pasca Orde Baru, yang diklaim sebagai era reformasi, tak membuat sastrawan, penulis, seniman, hingga media selamat dari sensor, intimidasi, serta kriminalisasi.

Untuk seniman, ancaman baru justru bertambah pasca Orde Baru. Para seniman mulai banyak yang dipermasalahkan bukan hanya karena keterlibatannya dalam organisasi yang dianggap berbahaya, melainkan karena karyanya sendiri: karena lukisan yang dibuatnya, karena naskah drama yang diciptakannya, karena patung yang dipahatnya.

Bedanya, tindakan represif itu tidak selalu langsung dilakukan oleh penguasa. Kaki-kaki lain yang bekerja, mulai dari relawan, tokoh sekolah, hingga universitas yang seharusnya menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Sungguh dekaden.

Tahun lalu, Yos Suprapto, seniman asal Yogyakarta, pameran tunggalnya yang bertajuk *"Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan"* tak luput dari sensor. Beberapa lukisannya yang dilarang dipamerkan di antaranya memuat potret mirip Joko Widodo.

Isi lukisannya menggambarkan sosok mirip Jokowi sedang duduk bagaikan raja dan menginjak tubuh-tubuh rakyat.

Ada juga sosok mirip Jokowi yang sedang bersenggama sembari pantatnya dijilati oleh banyak orang dan dikelilingi ilustrasi protes dari ibu-ibu.

Ketakutan terhadap visual tampaknya semakin bermunculan.

Bahkan, media pun bisa dipermasalahkan karena ilustrasi sampulnya. Ingat sampul majalah Tempo yang memuat ilustrasi Jokowi dengan bayangan Pinokio?

Media yang pernah mendapat represifitas dari Orde Baru itu kini masih panen tekanan. Relawan Jokowi Mania melaporkan majalah Tempo ke Dewan Pers.

Tapi, bisa dipahami jika protes dengan medium visual ini makin ditakuti oleh penguasa dan kaki tangannya—jika memahaminya melalui kacamata penguasa yang antikritik.

Visual selalu mempunyai kecenderungan mudah diterima, bahkan bagi orang yang buta huruf. Ia juga lebih inklusif bagi orang-orang yang tidak beruntung dan dihambat aksesnya terhadap pendidikan.

Kemarahan bisa jadi menyebar lebih cepat. Siapa pun bisa mengekspresikannya.

Ini pernah terjadi di Perancis, saat visual/poster menjadi salah satu medium berpengaruh pada masa Revolusi 1968. Mahasiswa École des Beaux-Arts (Sekolah Seni Rupa Paris) mendirikan *Atelier Populaire*, yang memindahkan seni di galeri menjadi di jalanan, salah satunya dalam bentuk poster. *Atelier Populaire* dibentuk di tengah media yang sudah dikontrol oleh penguasa.

Mereka membuat lebih dari 400 desain poster menggunakan teknik yang murah dan mudah diperbanyak pada era itu, yakni *screen printing* (sablon). Gerakan itu dilakukan secara kolektif dan anonim, untuk menegaskan bahwa karya bukan milik individu melainkan milik gerakan sosial.

Poster-poster ini ditempel di seluruh Paris. Aksi mahasiswa cepat meluas menjadi pemogokan nasional. Lebih dari 10 juta buruh berhenti bekerja. Ini adalah salah satu gerakan sosial terbesar dalam sejarah Prancis modern.

Mungkin ini juga yang menjadi alasan rezim Jokowi dan Prabowo Subianto lebih sensitif terhadap visual.

Bahayanya, selain visual, rezim Orde Baru 2.0 ini juga mempunyai kecenderungan takut akan kata-kata yang singkat, seperti judul

berita dan tulisan-tulisan di poster.

Poster-poster ini ditempel di seluruh Paris. Aksi mahasiswa cepat meluas menjadi pemogokan nasional. Lebih dari 10 juta buruh berhenti bekerja. Ini adalah salah satu gerakan sosial terbesar dalam sejarah Prancis modern.

Mungkin ini juga yang menjadi alasan rezim Jokowi dan Prabowo Subianto lebih sensitif terhadap visual.

Bahayanya, selain visual, rezim Orde Baru 2.0 ini juga mempunyai kecenderungan takut akan kata-kata yang singkat, seperti judul berita dan tulisan-tulisan di poster.

Buktinya, mural bertuliskan *"404: Not Found"* di atas wajah Jokowi di Tangerang dihapus oleh aparat, dan penciptanya diburu polisi pada 2021. Mural ini dianggap menghina kepala negara, sebagaimana mengacu pada pasal karet yakni pasal 207 KUHP.

Tak hanya itu, kaki tangan penguasa era Prabowo juga melakukan perampasan poster protes aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terkait pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan secara diam-diam di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Hampir setiap pasca demonstrasi, poster-poster protes dicabut dan dibuang. Mural-mural dihapus, lalu dicat ulang. Entah menggunakan uang siapa.

Alih-alih menerima masukan dan introspeksi, tindakan itu tampaknya lebih masuk akal bagi nalar penguasa yang antikritik.

Kedangkalan rezim antikritik juga tercermin dari langkah Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menggugat Tempo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena judul berita harian Tempo edisi 16 Mei 2025. Judul yang dipermasalahkan adalah "Poles-poles Beras Busuk."

Sekali lagi, yang dipermasalahkan adalah judul, bukan terkait informasi yang diberitakan. Bayangkan jika semua coret-coret keresahan di tembok dan judul-judul berita banyak yang diperkarakan seperti ini? Pait, pait, pait.

Kebebasan berekspresi? Terdengar terlalu muluk.

Menghadapi penguasa antikritik harus bandel dan keras kepala. Ini yang sudah dan masih dilakukan oleh banyak masyarakat Indonesia. Salah satunya menyebarkan poster melalui lini digital.

Penggandaan poster mulai masif. Gerakan *download-print-copy-and-paste* makin banyak diterapkan di mana-mana. Dengan internet, penyebaran poster bisa melesat cepat, berseliweran di linimasa.

Dengan modal yang cukup terjangkau, poster-poster itu bisa bebas *diprint* oleh siapapun. Poster yang sama bisa berada di tempat-tempat yang berbeda dalam waktu bersamaan.

Ada yang tak kalah penting selain bandel dan keras kepala, yaitu kehati-hatian. Menghadapi penguasa yang antikritik, represif, dan manipulatif harus mempunyai manajemen risiko yang baik.

Mereka—penguasa—bisa dengan mudah memenjarakan orang yang membuat poster kritik dengan dalih menghina kepala negara dan pasal-pasal karet lainnya seperti dalam KUHP dan UU ITE. Di sini kehati-hatian menjadi penting.

Saat jalur konstitusi tak lagi bisa diandalkan karena sering kali hakimnya berpihak pada penguasa zalim, bersiasat adalah alternatif yang harus ditempuh.

"Bagaimana cara agar mengungkapkan pendapat dan kritik di media sosial atau mencetaknya dalam sebuah poster tak dijebloskan ke penjara?"

Harusnya pertanyaan ini bisa dijawab dengan mudah: penguasa tak antikritik dan menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Bahkan pertanyaan ini tak seharusnya ada jika penguasa tak menyelewengkan kekuasaannya.

Ironisnya, pertanyaan ini sulit dihindari. Kita semua kelimpungan menghadapi rezim Orba 2.0, yang tak bisa membedakan masukan, kritik, dan hinaan.

Ketika seorang teman dari teman yang baru saya temui dua kali mengajak saya membayangkan okupasi ruang dengan poster yang sangat masif, saya berpikir apakah ini bisa menjadi alternatif? Ketika wabah ketakutan yang dibuat oleh penguasa dibalas dengan wabah lebih menakutkan, apakah bisa membawa perubahan?

Mungkin, kita akan kewalahan menghadapi kriminalisasi lewat jerat UU ITE jika menggunakan media sosial untuk membuat bom poster. Dalam konteks digital, kemunculan internet generasi kedua *(web2)* pada pertengahan 2000-an memungkinkan orang untuk mengunggah, berkomentar, dan berbagi.

Era ini ditandai dengan bermunculan media sosial, siapa pun dapat berekspresi. Namun, kita rentan karena berada di bawah pengawasan negara dan pasal karet dalam UU ITE bisa dikenakan kepada siapa saja.

Ceritanya mungkin akan beda lagi jika hal ini dilakukan di *web3*, sebagai evolusi lanjutan dari *web2* yang kini dikenal sebagai platform desentralisasi *(blockchain)*. Platform ini memegang prinsip keamanan data/privasi dan mewadahi anonimitas, sehingga keberadaan pengguna akan lebih sulit dilacak. Daya jangkaunya juga tak kalah luas dengan *web2*. Ini bisa jadi alternatif gerakan bawah tanah menebar poster kritik.

Sosiolog asal Spanyol, Manuel Castells, dalam bukunya *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*, menjelaskan bahwa keterhubungan antara ruang publik digital—yang melampaui kendali media arus utama—dan ruang publik perkotaan yang diokupasi untuk menantang otoritas institusional merupakan inti dari gerakan sosial baru.

Namun itu belum menjadi syarat yang cukup. Apalagi *web3* belum sepopuler *web2*. Dari 284.438.800 penduduk Indonesia, pengguna internet berbasis blockchain baru sekitar 21.000.000 penduduk. Tapi bukan berarti tak ada alternatif siasat lain.

Bagaimana jika justru kembali ke hal yang konvensional adalah siasat yang paling masuk akal saat ini?

Kembali ke pertanyaan awal: bagaimana jika semua orang berbondong-bondong memenuhi ruang dengan poster? Bagaimana jika gerakan revolusi visual di Perancis tahun 1968 direplikasi di era sekarang dengan penggandaan poster yang lebih masif?

Seberapa banyak aparat, ormas, dan kaki tangan penguasa yang harus dikerahkan? Berapa lama mereka harus melakukan tindakan pandir untuk memusnahkannya? Akan ditempatkan di mana jika semua orang hendak dijebloskan ke penjara?

Selain terjangkau dan inklusif, menghindari kriminalisasi karena menempel poster kritik masih bisa diakali, salah satunya dengan pembacaan situasi dan solidaritas.

Sebagai penutup, saya ingin menukil kalimat sosiolog Henri Lefebvre yang mungkin masih relevan, bahwa *"untuk mengubah kehidupan, maka kita harus mengambil alih ruang."* Ruang bukan sekadar fisik, ia diproduksi secara sosial. Perebutan ruang bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana, namun membuat lelah penguasa.

Sumber:

[1] Cooper, B. (2023). *Affichage: Posters as a Powerful Tool of Protest, Politics, and Propaganda in France.*

[2] Lefebvre, H. (1974). *The Production of Space. Oxford: Blackwell.*

[3] Castells, M. (2015). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age.* Cambridge: Polity Press.

[4] Mirzoeff, N. (2011). *The Right to Look: A Counterhistory of Visuality.* Durham: Duke University Press

KEEP MAKING (A)RT AND NEVER TRUST THE GOVERN-MENT



Koperasi Cetak, Mungkin?

Oleh: Junieawan Bagaskara

Sejarah kebudayaan Indonesia berjalan dalam gempa panjang: dari tragedi besar 65, ruang-ruang yang dibungkam setelahnya, dari suara-suara yang tak pernah padam, hingga gelombang protes 1998, ketika seniman ikut melebur bersama masyarakat turun ke jalan, menghadirkan slogan, poster, musik, dan mural sebagai medium kemarahan kolektif untuk membelah ketakutan. Dalam perjalanan itulah kita belajar: kebudayaan bukan hanya cermin zaman, melainkan kekuatan yang dapat menentukan arah ke depan.

Di Yogyakarta, Taring Padi menunjukkan bahwa seni tidak harus tunduk pada pusat kuasa. Membawa gambar ke jalan, menyebarkannya ke massa, mencetaknya dari tangan ke tangan. Mereka dan kelompok seni rakyat lainnya dapat menghadirkan karya sebagai pendidikan pembebasan, bukan sebagai dekorasi ruang kekuasaan. Dari luka, kebersamaan, hingga keberanian mereka, kita mewarisi satu kesadaran penting: seni yang merakyat adalah seni yang bergerak.

Gelombang setelahnya bergerak jauh lebih cepat. Teknologi jaringan mengubah cara kita mencipta dan berbagi.

Justseeds—kolektif seni internasional—membuktikan bahwa poster dapat melintasi batas negara, diunduh siapa saja, dicetak di mana saja, dan menjadi bagian dari aksi dan solidaritas global. Sementara The Pirate Bay memperlihatkan bahwa informasi ingin menjadi bebas; bahwa pembajakan bukan sekadar kriminal, tetapi perlawanan terhadap monopoli pengetahuan.

Hari ini, ruang digital memungkinkan kita melanjutkan tradisi panjang itu: dari pamflet bawah tanah ke poster bebas unduh; dari solidaritas cetak tangan ke distribusi peer-to-peer. Kita mulai membangun bukan hanya karya, tetapi infrastruktur kebudayaan; arsip terbuka; sistem distribusi yang tidak terpusat; dan model ekonomi yang berakar pada desentralisasi.

Karena seni tidak cukup hanya menjadi respons sementara terhadap krisis. Ia perlu membangun sebuah mekanisme untuk bertahan, bertumbuh, dan memperluas dampak.

Maka gagasan ini diajukan:

<koperasi seni berbasis prinsip copyleft>

Koperasi seni ini berdiri di atas keyakinan bahwa seni, kolektor, dan komunitas adalah satu ekosistem perjuangan. Tidak ada seniman besar tanpa dukungan rakyat yang mempercayainya. Tidak ada perubahan sosial tanpa bahasa visual yang menyulut imajinasi. Maka relasi itu harus dibenahi: dari relasi pasar yang eksploitatif menuju kolektivitas yang saling menguatkan.

Hak cipta sering kali digunakan sebagai pagar, memagari karya dari masyarakat. Bahkan dari tujuannya sendiri. Koperasi ini justru menekankan hal sebaliknya: karya tumbuh ketika ia bisa disalin, dikutip, dan diadaptasi. Ketika poster propaganda dicetak ulang ratusan kali di tangan massa, dan diamplifikasi di sosial media, di situlah ia menemukan maknanya.

Bayangkan, bagaimana jika di masa depan, generasi-generasi setelah kita tetap dapat menikmati artefak visual yang dapat bercerita bahwa puluhan tahun lalu negara ini pernah melakukan kejahatan pada rakyatnya?

Saya rasa di situlah seni berhasil menjalankan salah satu perannya: sebagai penyadaran.

Sehingga melalui koperasi, karya seni akhirnya tetap dapat diakses publik kapan pun—secara gratis dan bebas unduh—sembari seniman tetap didukung melalui penjualan versi fisik berkualitas tinggi, pameran kolektif, dan distribusi hasil yang adil. Publik mendapatkan hak untuk mengakses, seniman mendapatkan hak untuk hidup. Pun, teknologi hari ini memungkinkan demokrasi distribusi semakin merata.

DAO *(Decentralized Autonomous Organization)* membuktikan bahwa ruang untuk mengambil keputusan tidak lagi dibuat hanya oleh satu figur atau lembaga yang terpusat, melainkan oleh komunitas secara luas. *Seniman tidak hanya sebatas pembuat karya dan kolektor tidak hanya membeli karya seniman,* mereka terlibat dalam konsensus bersama untuk membangun gerakan kebudayaan.

Sumber:

[1] Anderson, B. (1990). *Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective. In State and Civil Society in Indonesia.* Cornell SEAP.

[2] Boyle, J. (2008). *The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind.* Yale University Press.

[3] Lessig, L. (2004). *Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity.* Penguin Press.

[4] Jurriëns, E. & Tapsell, R. (2017). *Visual Media in Post-New Order Indonesia. Routledge.*





ART IS ALWAYS POLITIC(A)L

use it without limitation;
(re)distribute it in as any copies es as desired,
and modify it in any way they see fit.